



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JOMBANG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Struktur Organisasi	3
1.3. Data Kepegawaian	5
1.4. Profil Aset.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Kinerja Tahun 2025	9
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	10
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
3.1.1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	13
3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan 2 (Dua) Tahun Terakhir	16
3.1.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja Level Nasional/Internasional.....	21
3.1.4. Analisis Atas Realisasi Kinerja	23
3.2. Realisasi Anggaran	27
3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran.....	27
3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
3.3. Upaya Perbaikan Kinerja	49
BAB IV PENUTUP	51
4.1. Kesimpulan.....	51
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	51

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kami sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dapat menyelesaikan penyusunan **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2025”** dengan baik dan tepat waktu.

LKjIP Tahun 2025 ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang selama 1 (satu) tahun anggaran 2025 yaitu dari 1 Januari – 31 Desember 2025. Dengan disusunnya LKjIP ini dapat dilihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan suatu Instansi Pemerintah dan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja untuk tahun mendatang.

Menyadari betapa pentingnya LKjIP bagi suatu Instansi Pemerintah maka penyusunannya harus didasarkan pada prinsip jujur, obyektif dan transparan, sehingga apabila ada kegiatan yang belum maksimal pelaksanaannya dapat diketahui kendala-kendalanya dan segera dapat dicarikan pemecahan atau solusinya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini. Kami menyadari LKjIP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan guna perbaikan dalam penyusunan LKjIP selanjutnya.

Akhirnya semoga LKjIP Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Jombang.

Jombang, Januari 2026
KEPALA DINAS PPKBPPA



Dr. dr. Ma'murotus Sa'diyah, M. Kes
NIP. 197112142005012006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang telah diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur staf pada Bupati Jombang, dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PPKB dan PPPA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan dibidang Keluarga Berencana adalah:
 1. Masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dalam Program Keluarga Berencana, ditandai dengan rendahnya kesertaan KB serta belum optimalnya pelayanan KB di fasilitas kesehatan.
 2. Belum optimalnya pelayanan KB di fasilitas kesehatan, karena tidak semua pengelola faskes memberikan komitmen atas terselenggaranya pelayanan KB serta distribusi alokon yang belum sepenuhnya optimal.

3. Keterbatasan penyuluh KB, yaitu 306 desa dibina hanya oleh 73 penyuluh, sehingga berdampak pada rendahnya jangkauan pelayanan dan konseling KB.
- b. Permasalahan dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah:
1. Masih rendahnya keaktifan kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS, sehingga program pembinaan keluarga belum optimal.
 2. Keterbatasan kapasitas SDM kader keluarga, termasuk kurangnya pendampingan dan fasilitas untuk pelaksanaan pembinaan ketahanan keluarga.
 3. Belum terintegrasinya secara optimal program lintas sektor di Kampung KB, sehingga program pembangunan keluarga belum berjalan maksimal.
- c. Permasalahan dibidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender adalah:
1. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konsep dan implementasi kesetaraan gender masih rendah, sehingga berpengaruh pada peran perempuan di berbagai sektor.
 2. Partisipasi perempuan dalam sektor-sektor strategis masih rendah, termasuk di bidang ekonomi, politik, serta pengambilan keputusan.
 3. Keterbatasan akses perempuan terhadap peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi, sehingga perempuan belum sepenuhnya berdaya untuk berperan dalam kesejahteraan keluarga.
- d. Permasalahan dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah:
1. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sementara sistem pelaporan dan penanganan kasus belum berjalan optimal.
 2. Belum optimalnya fasilitas pelayanan pengaduan tindak kekerasan, termasuk sistem informasi, respons kasus, serta pendampingan korban.
 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan mencegah kekerasan, termasuk masih rendahnya edukasi keluarga tentang pola pengasuhan positif dan pencegahan kekerasan.

Isu-isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas PPKB dan PPPA dimasa datang. Adapun isu- isu strategis pelayanan Dinas PPKB dan PPPA adalah sebagai berikut:

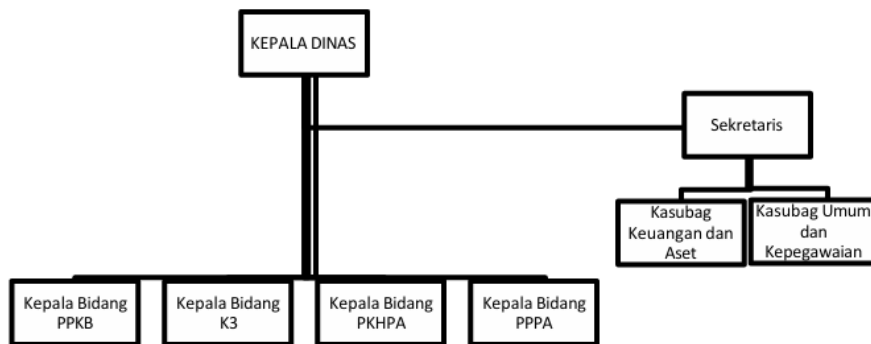
- a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Berencana, termasuk belum optimalnya pelayanan KB di fasilitas kesehatan akibat keterbatasan komitmen faskes serta belum optimalnya distribusi alkon dan obat kontrasepsi.
- b. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum optimalnya sistem pelaporan, penanganan kasus, dan pelayanan pengaduan tindak kekerasan.
- c. Belum terselenggaranya kesetaraan gender secara optimal di berbagai sektor, termasuk rendahnya representasi dan partisipasi perempuan dalam bidang strategis serta lemahnya kesadaran masyarakat terhadap isu gender.
- d. Terbatasnya kapasitas dan ketersediaan SDM (misalnya 306 desa dilayani hanya oleh 73 penyuluh), termasuk adanya mutasi pegawai dan tidak cepatnya penggantian aparatur purna tugas, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan.

1.2. Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Jombang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang, struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak meliputi:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- e. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut:



Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang telah melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Keluarga Penduduk dan Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- f. Pembinaan Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang per 31 Desember adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Orang)
STATUS KEPEGAWAIAN		
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	17
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	4
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu	12
TOTAL PEGAWAI		33
JABATAN		
1	Struktural	9
2	Fungsional	4
3	Pelaksana	8
4	PPPK paruh waktu	12
PENDIDIKAN		
1	SMP	2
2	SMA	4
3	D III	1
4	S1 (Sarjana)	14
5	S2 (Magister)	11
6	S3 (Doktor)	1
GOLONGAN		
1	IX (PPPK)	2
2	III/a	1
3	III/b	3
4	III/d	4
5	IV/a	10
6	IV/c	1
JENIS KELAMIN		
1	Pria	12
2	Wanita	21
TEMPAT TINGGAL		
1	Kabupaten Jombang	32
2	Non – Kabupaten Jombang	1

1.4. Profil Aset

Guna Mendukung kinerja instansi, diperlukan sumber daya yang memadai, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki aset untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya berupa:

No	Uraian	Hasil Rekon 2022	RKBMD 2023				Jumlah	RKBMD 2024		
			Pengadaan	Penghapusan	Pemindahtanganan	Pemanfaatan		Pemeliharaan	Standar Kebutuhan	Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5-6-7	9	10	11
1	Tanah Bang. Kantor Pemerintah	2			0	0	2	2	2	0
2	Pompa Air	4			0	0	4	4	4	0
3	Station Wagon	5		1	0	0	4	5	4	0
4	Micro Bus (15-30 Orang)	1			0	0	1	1	1	0
5	Pick Up	1			0	0	1	1	1	0
6	Sepeda Motor	103		1	0	0	102	103	102	0
7	Almari Besi/Metal	6	1	1	0	0	6	6	6	0
8	Rak Besi / Metal	11	5	5	0	0	11	11	12	1
9	Rak Kayu	16	2	2	0	0	16	16	18	2
10	Filling Besi/Metal	10	2	2	0	0	10	10	11	1
11	Brandkas	1			0	0	1	1	1	0
12	Lemari Kaca	2			0	0	2	2	2	0
13	Alat Penyimpanan Lainnya / lemari kaca	1			0	0	1	1	1	0
14	Alat Penghancur Kertas	2			0	0	2	2	2	0
15	Papan Pengumuman / baliho (kec. Bareng , kabuh)	2			0	0	2	2	2	0
16	Alat Kantor Lainnya / tandon	1			0	0	1	1	1	0
17	Lemari Kayu	3			0	0	3	3	3	0
18	Meja Kayu /Rotan	21			0	0	21	21	21	0
19	Kursi Kayu / Rotan	31	10	10	0	0	31	31	31	0
20	Zice /	1			0	0	1	1	1	0
21	Meja Rapat	20			0	0	20	20	23	3

22	Meja Tulis / 1/2 biro	23			0	0	23	23	23	0
23	Meja Bundar	1			0	0	1	1	1	0
24	Kursi Rapat	24	2	2	0	0	24	24	24	0
25	Kursi Tamu	1			0	0	1	1	1	0
26	Kursi Putar	2			0	0	2	2	2	0
27	Kursi Biasa	111	49	49	0	0	111	111	111	0
28	Bangku Tunggu	3			0	0	3	3	3	0
29	Sofa	2			0	0	2	2	2	0
30	Korden	2			0	0	2	2	2	0
31	Lemari Es	2			0	0	2	2	2	0
32	Ac Sentral / DAIKIN	1		1	0	0	0	1	0	0
33	Ac Unit (LG , Daikin)	2		2	0	0	0	2	0	0
34	Ac. Split	38	5	5	0	0	38	38	48	10
35	Kipas Angin	5	5	5	0	0	5	5	7	2
36	Alat Pendingin Lainnya	2			0	0	2	2	2	0
37	Alat Dapur Lainnya / Trolly	1			0	0	1	1	1	0
38	Sound System	16			0	0	16	16	17	1
39	Lambang Garuda Pancasila	1			0	0	1	1	1	0
40	G.Presiden/Wk.P residen	1			0	0	1	1	1	0
41	Kaca Hias	1			0	0	1	1	1	0
42	Handy Cam	1			0	0	1	1	1	0
43	P.C. Unit	55	16	16	0	0	55	55	75	20
44	Lap Top	18	1	1	0	0	18	18	32	14
45	Note Book	30	24	24	0	0	30	30	45	15
46	Printer	102	58	59	0	0	101	102	102	36
47	Scanner/ RB	1	1	1	0	0	1	1	2	1
48	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9			0	0	9	9	9	0

49	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	38	5	5	0	0	38	38	38	0
50	Meja Rapat Pejabat lainnya	1			0	0	1	1	1	0
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	2	2	0	0	8	8	8	0
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18	7	7	0	0	18	18	18	0
53	Kursi Rapat Pejabat	1			0	0	1	1	1	0
54	Kursi Tamu Diruangan Pejabat E	5			0	0	5	5	5	0
55	Camera+Attachm ent	3			0	0	3	3	3	0
56	Proyektor+Attach ment	19			0	0	19	19	20	1
57	Facsimile	2	1	1	0	0	2	2	2	0
58	Handphone	24			0	0	24	24	24	0
59	Publik Address (Lapangan)	11			0	0	11	11	11	0
60	Gedung Kantor Permanen	2			0	0	2	2	2	0
61	Tempat Ibadah Permanen	1			0	0	1	1	1	0
62	Bang.Ged.Perte m. Permanen / kb	19	2		0	0	21	19	21	0
63	Rtt.Gol.I Perm.Kelas III	1			0	0	1	1	1	0
64	Inst.Grd.Distr.Ka p.Sedang	1			0	0	1	1	1	0
65	Jrn.Distr.Teg.Diat as 20k	5			0	0	5	5	5	0
66	Jaringan Distribusi Lainnya	1			0	0	1	1	1	0
67	Prinjer Print / BKD	2			0	0	2	2	2	0
69	CCTV		12		0	0	12	0	12	0
70	layar Proyektor									1
71	Mic Wireles 2 Microphone									1

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Kinerja Tahun 2025

VISI

Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang untuk periode tahun 2024-2029 adalah :
“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing“

MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut maka misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang adalah Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius, dan Berbudaya.

TUJUAN

Untuk mendukung visi dan misi maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang mempunyai tujuan yaitu:

1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana;
2. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;
4. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

SASARAN

1. Meningkatnya Peserta KB Aktif;
2. Menurunnya Unmet need;
3. Meningkatnya Anggaran Responsif Gender;
4. Meningkatnya perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif;
5. Meningkatnya Perlindungan khusus Anak yang mendapatkan layanan komprehensif;
6. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

INDIKATOR

1. Persentase Peserta KB Aktif;
2. Persentase Unmet need;
3. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender);
4. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif;
5. Persentase Perlindungan khusus Anak yang mendapatkan layanan komprehensif;
6. Nilai Evaluasi SAKIP.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Untuk mewujudkan tujuan Organisasi, maka ditetapkan sasaran dengan fokus utama berupa target yang tercantum pada Indikator Kerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Persentase Peserta KB Aktif
2	Menurunnya Unmet need	Persentase Unmet need
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)
4	Meningkatnya perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif
5	Meningkatnya Perlindungan khusus Anak yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase Perlindungan khusus Anak yang mendapatkan layanan komprehensif
6	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP

No	Sasaran Program	Program	Indikator Program
1	Tercapainya Peserta KB Aktif	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pertumbuhan Akseptor KB Aktif
2	Menurunnya Perkawinan pertama wanita usia < 20 tahun	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok BKB, BKR, BKL, PIKR, PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang Aktif
3	Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG
4	Meningkatnya layanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus tindak kekerasan pada perempuan yang terselesaikan
5	Meningkatnya layanan korban tindak kekerasan terhadap anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus tindak kekerasan pada anak yang terselesaikan
6	Meningkatnya Capaian Desa Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa Layak Anak
7	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang adalah sebagaimana tabel di bawah berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Presentase Peserta KB Aktif	70.40%
2	Menurunnya Unmed Need	Presentase Unmeed Need	10.70%
3	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender	Presentase Anggaran Responsif Gender	39.00%
4	Meningkatnya Perempuan korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Presentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100%
5	Meningkatnya Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Presentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	A

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dengan adanya kepmendagri nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 maka dilaksanakan Perubahan Renstra yang mengakibatkan Perubahan Sasaran Strategis pada Dinas PPKB dan PPPA, dan Pemetaan juga telah dilaksanakan oleh Dinas PPKB dan PPPA yang telah disesuaikan dengan kepmendagri nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024. Dengan demikian, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan dan melaksanakan target kinerja berupa:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (formulasi)	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Presentase Peserta KB Aktif	70.40%	$\frac{135.548 \text{ Jumlah Akseptor KB Aktif}}{207.524 \text{ Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$ <p>= 65.31%</p>	92.85%
2	Menurunnya Unmed Need	Presentase Unmeed Need	10.70%	$\frac{11.767 \text{ Jumlah Unmeet Need}}{207.524 \text{ Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$ <p>= 6%</p>	178.3%
3	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender	Presentase Anggaran Responsif Gender	39.00%	$\frac{473 \text{ Jumlah Sub Kegiatan}}{673 \text{ Jumlah Sub Non Rutin}} \times 100$ <p>= 70%</p>	55.71%
4	Meningkatnya Perempuan korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Presentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	$\frac{94 \text{ Jumlah laporan kasus}}{94 \text{ Jumlah layanan komprehensif}} \times 100$ <p>= 100%</p>	100%
5	Meningkatnya Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Presentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	$\frac{116 \text{ Jumlah laporan kasus}}{116 \text{ Jumlah layanan komprehensif}} \times 100$ <p>= 100%</p>	100%

6	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas	Nilai Evaluasi SAKIP	A (80)	(BB) 71,25	89%
---	-------------------------------------	----------------------	--------	---------------	-----

Keterangan:

1. Realisasi persentase Peserta KB Aktif di Kabupaten Jombang pada tahun evaluasi mencapai 65.31% dari target yang ditetapkan sebesar 70.40%. Adapun jumlah akseptor KB Aktif sebanyak 135.548 per Bulan November ditarik data dari Aplikasi SIGA BKKBN Provinsi Jawa Timur, untuk bulan Desember data Akseptor KB Aktif belum terupdate . Jika dipersentasekan terhadap target, maka capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar 92.85%, yang masuk dalam kategori "Sangat Tinggi/Baik", meskipun secara angka absolut belum memenuhi target 70.40%. Selain itu ada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian penduduk berupa PPKBD dan Sub PPKBD yang berperan aktif dalam pengendalian penduduk di 306 Desa Kabupaten Jombang, pemahaman pola pikir anggota PPKBD dan Sub PPKBD menjadikan PPKBD dan Sub PPKBD kepanjangan tangan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Jombang
2. Capaian indikator Menurunnya Unmet Need pada tahun pelaporan menunjukkan hasil sangat baik, dengan realisasi sebesar 6,00%, lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 10,70%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar Pasangan Usia Subur yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan telah terlayani melalui program Keluarga Berencana, Karena indikator ini bersifat menurunkan, maka semakin kecil nilai realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik. Tingginya capaian kinerja sebesar 178,3% dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
 - ✚ Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, baik melalui fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta.
 - ✚ Penguatan peran Penyuluh KB dan kader dalam melakukan pendataan, KIE, dan pendampingan PUS.
 - ✚ Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi.
3. Capaian indikator *Meningkatnya Anggaran Responsif Gender* pada tahun pelaporan menunjukkan hasil **baik**, dengan realisasi sebesar **70,00%**,

melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **39,00%**. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sub kegiatan non rutin yang dilaksanakan telah mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran dan hal ini dikarenakan telah dilakukan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota sehingga dapat meningkatkan jumlah OPD dan Desa yang menerapkan kebijakan yang responsive gender dan mengintegrasikan isu gender dalam perencanaan pelaksanaan evaluasi dan monitoring dalam pembangunan, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dan melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

4. Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang berhasil mencapai target kinerja sebesar 100% dalam memberikan layanan kepada perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Seluruh kasus yang dilaporkan sebanyak 94 kasus telah ditangani secara tuntas melalui berbagai bentuk layanan komprehensif, mulai dari pengaduan, medis, rehabilitasi sosial, hingga bantuan hukum. Angka **94 kasus** menunjukkan bahwa sistem pelaporan di Kabupaten Jombang berjalan dengan baik, karena masyarakat mulai berani melaporkan tindakan kekerasan untuk mendapatkan perlindungan negara.
5. Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang telah berhasil memenuhi kewajiban perlindungan anak dengan capaian kinerja sebesar 100%. Seluruh laporan kasus anak yang masuk, yaitu sebanyak 116 kasus, telah mendapatkan penanganan secara komprehensif. Layanan ini mencakup pendampingan psikologis, bantuan hukum, layanan medis/visum, hingga upaya reintegrasi sosial bagi anak korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Angka **116 kasus** menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap Dinas PPKB PPPA Jombang dalam mengadukan permasalahan anak, sehingga anak mendapatkan hak perlindungannya sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak.
6. Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang pada

tahun berjalan adalah sebesar **71.25** dengan predikat "**BB**" (**Sangat Baik**). Meskipun nilai ini menunjukkan kualitas akuntabilitas kinerja yang baik, namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu predikat "**A**" (**80.00**), maka persentase capaian kinerjanya adalah sebesar **89.06%**.

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan 2 (Dua) Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Sebelumnya		Realisasi
			2023	2024	2025
1	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Presentase Peserta KB Aktif	74%	71%	65.31%
2	Menurunnya Unmed Need	Presentase Unmeed Need	9.3%	6.69%	6%
3	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender	Presentase Anggaran Responsif Gender	31%	39%	70%
4	Meningkatnya Perempuan korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Presentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Presentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	97.52%	100%
6	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas	Nilai Evaluasi SAKIP	74.23	75.49	71.25

Keterangan:

1. Kinerja 2023 - 2024: Terdapat penurunan sebesar 3% dari tahun 2023 (74%) ke tahun 2024 (71%). faktor penyebab seperti adanya drop-out kepesertaan, hal ini sering disebabkan oleh efek samping penggunaan (seperti gangguan siklus menstruasi atau kenaikan berat badan) yang membuat peserta berhenti menggunakan kontrasepsi tanpa segera beralih ke metode lain atau kendala dalam pelaporan mandiri oleh fasilitas kesehatan. Capaian pada tahun 2025 tercatat sebesar 65,31%. Perlu dicatat bahwa angka ini merupakan data interim yang ditarik dari aplikasi SIGA BKKBN Jatim hingga posisi November 2025. Rendahnya angka ini dibandingkan tahun sebelumnya

disebabkan oleh belum ter-input-nya data pelayanan bulan Desember 2025 ke dalam sistem pada saat laporan ini disusun.

2. Angka Unmet Need mengalami penurunan yang stabil, yakni dari 9,3% pada tahun 2023 menjadi 6,69% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan aksesibilitas layanan KB bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada posisi November 2025, angka Unmet Need berhasil ditekan hingga menyentuh angka 6%. Meskipun data bulan Desember belum terakumulasi di aplikasi SIGA, pencapaian 6% ini menunjukkan progres yang sangat positif karena sudah lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya. Penurunan angka ini mengindikasikan bahwa program peningkatan kualitas konseling oleh kader, serta distribusi alat kontrasepsi yang merata di fasilitas kesehatan telah berhasil menjawab kebutuhan masyarakat. Semakin rendahnya angka Unmet Need berkontribusi langsung pada penurunan risiko kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) serta mendukung program percepatan penurunan stunting melalui pengaturan jarak kelahiran (KB pasca persalinan).
3. Pada tahun 2025, Dinas PPKB-PPPA mencatatkan realisasi sebesar **70%**. Angka ini menunjukkan lonjakan performa sebesar **31%** dibandingkan tahun 2024 (39%). Peningkatan drastis ini mencerminkan keberhasilan instansi dalam melakukan institusionalisasi PUG ke dalam hampir seluruh sub-kegiatan di lingkungan dinas. Jika ditarik dari tahun 2023 (31%), terdapat tren kenaikan yang sangat progresif selama tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) bukan sekadar formalitas, melainkan telah menjadi bagian dari budaya perencanaan strategis organisasi melalui instrumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS).
4. Selama tiga tahun berturut-turut (2023-2025), Dinas PPKB-PPPA berhasil mempertahankan realisasi kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh korban perempuan dan TPPO yang dilaporkan/teridentifikasi di Kabupaten Jombang telah mendapatkan penanganan secara tuntas. Keberhasilan mempertahankan angka sempurna (100%) selama tiga tahun menunjukkan responsivitas yang tinggi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta sinergi yang kuat dengan pihak kepolisian, rumah sakit, dan lembaga penegak hukum lainnya.

5. Terdapat sedikit penurunan sebesar **2,48%** pada tahun 2024 (menjadi 97,52%). Hal ini umumnya disebabkan oleh adanya Kompleksitas Kasus yang Membutuhkan Waktu Lama (Carry-over Case) di akhir tahun anggaran. Pada tahun 2025, Dinas PPKB-PPPA kembali berhasil mencapai target sempurna sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh anak yang memerlukan perlindungan khusus yang teridentifikasi di Kabupaten Jombang telah tertangani dan mendapatkan akses layanan komprehensif (medis, psikososial, bantuan hukum, dan rehabilitasi). Keberhasilan kembali ke angka 100% pada tahun 2025 membuktikan adanya evaluasi berkelanjutan dan perbaikan manajemen kasus oleh UPTD PPA. Peningkatan koordinasi lintas sektor (dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan RSUD) memastikan tidak ada anak yang terabaikan hak perlindungannya.
6. Nilai SAKIP menunjukkan tren yang fluktuatif. Setelah mengalami kenaikan sebesar 1,26 poin pada tahun 2024 (dari 74,23 menjadi 75,49), terjadi penurunan sebesar 4,24 poin pada tahun 2025 menjadi 71,25. Penurunan ini secara teknis dapat dipengaruhi oleh perubahan indikator penilaian dari Inspektorat/Kemenpan RB yang lebih ketat, Meskipun nilai 71,25 masih berada dalam kategori yang cukup baik (Predikat BB), Dinas PPKB-PPPA Jombang perlu melakukan *review* menyeluruh terhadap dokumen pohon kinerja (cascading) dan memperkuat budaya kinerja di seluruh unit kerja untuk mengembalikan tren positif di tahun mendatang.

3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Manengah (RPJMD/Renstra)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Target Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Presentase Peserta KB Aktif	75.50%	65.31%	
2	Menurunnya Unmed Need	Presentase Unmeed Need	10.5%	6%	
3	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender	Presentase Anggaran Responsif Gender	74.50%	70%	
4	Meningkatnya Perempuan korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Presentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	Tetap

5	Meningkatnya Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Presentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	Tetap
6	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas	Nilai Evaluasi SAKIP	A	BB	

Keterangan:

1. Berdasarkan tabel di atas, realisasi Persentase Peserta KB Aktif pada tahun 2025 tercatat sebesar **65,31%**. Jika dibandingkan dengan target akhir periode jangka menengah (RPJMD/Renstra) yang ditetapkan sebesar **75,50%**, maka progres pencapaian target jangka menengah hingga saat ini telah mencapai **86,50%**. Terdapat selisih (gap) sebesar **10,19%** yang perlu diakselerasi dalam sisa periode perencanaan. Perlu dicatat bahwa angka ini merupakan data interim yang ditarik dari aplikasi SIGA BKKBN Jatim hingga posisi November 2025. Rendahnya angka ini dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh belum ter-input-nya data pelayanan bulan Desember 2025 ke dalam sistem pada saat laporan ini disusun. Data realisasi tahun 2025 sebesar **65,31%** tersebut merupakan **data progres per bulan November 2025** yang ditarik dari aplikasi **SIGA BKKBN Jawa Timur**.
2. Realisasi Persentase Unmet Need pada tahun 2025 menunjukkan angka sebesar 6%. Jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam [RPJMD/Renstra] sebesar 10,5%, maka capaian kinerja ini telah melampaui target yang ditetapkan. Karena Unmet Need merupakan indikator bersifat negative value (semakin kecil angkanya, semakin baik), maka realisasi 6% menunjukkan efektivitas program yang sangat tinggi karena berhasil menekan angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi jauh di bawah ambang batas maksimal yang ditargetkan (selisih positif sebesar 4,5%).
3. Realisasi Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada tahun 2025 tercatat sebesar 70%. Jika dibandingkan dengan target akhir yang ditetapkan dalam periode jangka menengah [RPJMD/Renstra] sebesar 74,50%, maka tingkat capaian kinerja terhadap target jangka menengah telah mencapai 93,96%. Hasil ini menunjukkan bahwa instansi berada pada jalur yang tepat (on track) untuk memenuhi komitmen pengarusutamaan gender (PUG) di

akhir periode perencanaan, dengan menyisakan selisih sebesar 4,50% yang perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya.

4. Realisasi indikator Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif pada Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang tahun 2025 telah mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa Dinas PPKB PPPA telah berhasil memenuhi target akhir jangka menengah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Jombang/Renstra Dinas. Keberhasilan mencapai target 100% ini didukung oleh beberapa upaya strategis, antara lain:

- ✚ Optimalisasi UPTD PPA: Peran aktif Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam merespons cepat setiap aduan yang masuk.

- ✚ Layanan 6 Fungsi: Pemenuhan layanan komprehensif yang meliputi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, mediasi, pendampingan korban (psikologis, hukum, medis), dan layanan penampungan sementara (Rumah Aman) dan sinergi lintas sektor.

5. Realisasi Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif pada Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang tahun 2025 telah mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilaporkan di Kabupaten Jombang telah tertangani sepenuhnya. Dengan hasil ini, Dinas PPKB PPPA telah berhasil memenuhi target akhir jangka menengah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang dan Renstra Dinas. Keberhasilan mencapai target 100% ini dipengaruhi oleh optimalisasi sistem perlindungan anak di Kabupaten Jombang, meliputi:

- ✚ Respon Cepat UPTD PPA: Penanganan kasus anak dilakukan secara sigap melalui UPTD PPA Kabupaten Jombang yang mencakup layanan medis, psikologis, bantuan hukum, hingga rehabilitasi sosial.

- ✚ Integrasi Layanan: Terjalinnnya sinergitas yang kuat antara Dinas PPKB PPPA dengan OPD terkait (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas

Pendidikan) serta aparat penegak hukum untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child).

- ✚ Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM): Adanya peran aktif masyarakat di tingkat kecamatan/desa dalam melaporkan kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus (seperti anak korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, anak disabilitas).

6. Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang pada tahun 2025 mencapai predikat **"BB"** (Sangat Baik). Berdasarkan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen [RPJMD/Renstra] sebesar predikat **"A"** (Memuaskan), maka realisasi tahun ini berada pada posisi satu tingkat di bawah target akhir. Meskipun realisasi tahun 2025 (predikat **BB**) belum menyamai target akhir jangka menengah (predikat **A**), namun secara substansi kualitas akuntabilitas di Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang terus mengalami tren positif.

3.1.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja Level

Nasional/Internasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Keterangan
			DPPKBPPPA Kab. Jombang	Jatim	Nasional/ Kementrian	
1	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Presentase Peserta KB Aktif	65.31%	-	-	Belum Rilis
2	Menurunnya Unmed Need	Presentase Unmeed Need	6%	5.37%	-	
3	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender	Presentase Anggaran Responsif Gender	70%	-	-	Belum Rilis
4	Meningkatnya Perempuan korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Presentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	-	-	Belum Rilis
5	Meningkatnya Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Presentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	-	-	Belum Rilis

6	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	-	-	
---	-------------------------------------	----------------------	----	---	---	--

Keterangan:

1. Realisasi persentase peserta KB aktif di Jawa Timur untuk tahun 2025 belum rilis. Data statistik resmi mengenai capaian kinerja, termasuk persentase peserta KB aktif, biasanya dirilis oleh lembaga terkait seperti BPS (Badan Pusat Statistik) atau BKKBN pada tahun berikutnya setelah periode pelaporan selesai.
2. Realisasi Persentase *Unmet Need* (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) di Kabupaten Jombang pada tahun 2025 mencapai angka **6%**. Jika disandingkan dengan capaian rata-rata **Provinsi Jawa Timur** sebesar **5,37%**, maka terdapat selisih sebesar **0,63%**. Hal ini menunjukkan bahwa angka *Unmet Need* di Kabupaten Jombang sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian Provinsi Jawa Timur, namun masih berada dalam kategori terkendali dan kompetitif di tingkat regional. Pada posisi Kementerian/Nasional data realisasi *Unmet Need* tingkat **Nasional** belum dirilis secara resmi oleh Kementerian Kesehatan maupun BKKBN Pusat. Namun, sebagai gambaran umum, Kabupaten Jombang tetap berupaya menjaga agar angka *Unmet Need* tetap berada di bawah ambang batas rata-rata nasional tahun sebelumnya sebagai bentuk kontribusi daerah terhadap target pembangunan nasional.
3. Hingga laporan ini disusun, data realisasi persentase ARG secara agregat untuk tingkat **Provinsi Jawa Timur** maupun tingkat **Nasional (Kementerian PPPA)** belum dirilis atau belum terupdate secara publik. Hal ini disebabkan oleh perbedaan siklus pelaporan dan proses verifikasi *Gender Budget Statement* (GBS) di tingkat yang lebih tinggi. Meskipun data pembandingan belum tersedia, Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang tetap memosisikan capaian **70%** sebagai capaian yang progresif. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran program dan kegiatan telah melalui analisis gender (*Gender Analysis Pathway*) dan telah memiliki pernyataan anggaran gender yang jelas.
4. Pada tahun anggaran 2025, DPPKB PPPA Kab. Jombang berhasil mencatatkan realisasi kinerja sebesar **100%**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terintegrasi dalam sistem pelaporan telah mendapatkan penanganan

secara menyeluruh. Layanan komprehensif yang diberikan meliputi aspek pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum/pendampingan hukum, hingga layanan keputungan dan reintegrasi sosial. Data capaian kinerja kolektif tingkat provinsi untuk tahun 2025 belum dirilis secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Data komparatif dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI juga masih dalam tahap finalisasi dan belum dipublikasikan sebagai acuan nasional.

5. Realisasi kinerja DPPKB PPPA pada tahun 2025 untuk indikator ini mencapai **100%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh anak yang teridentifikasi memerlukan perlindungan khusus (sesuai mandat UU Perlindungan Anak) telah mendapatkan akses layanan komprehensif. Layanan ini meliputi intervensi medis, psikologis, bantuan hukum, hingga pendampingan psikososial. Hingga pelaporan ini disusun, data capaian kolektif untuk tingkat Provinsi Jawa Timur **belum dirilis** secara resmi. Laporan komparatif dari **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)** belum dipublikasikan, sehingga posisi kinerja daerah terhadap rata-rata nasional belum dapat dipetakan secara presisi.
6. Pada tahun anggaran 2025, DPPKB PPPA berhasil meraih nilai evaluasi SAKIP dengan predikat "**BB**" (**Sangat Baik**). Capaian ini menunjukkan bahwa instansi telah memiliki sistem manajemen kinerja yang sangat baik dan akuntabel. Predikat ini mencerminkan bahwa DPPKB PPPA tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi telah berhasil menyelaraskan antara perencanaan strategis, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja dengan hasil (outcomes) yang nyata bagi masyarakat.

3.1.4. Analisis Atas Realisasi Kinerja

Secara umum, realisasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Jombang Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik dengan sebagian besar indikator kinerja utama (IKU) mencapai target yang telah ditetapkan bahkan melampauinya. Capaian tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam

mewujudkan visi dan misi daerah, khususnya dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap enam sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, diperoleh gambaran bahwa seluruh indikator kinerja mengalami perkembangan positif. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja tertinggi berada pada indikator layanan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang masing-masing mencapai 100%, menunjukkan bahwa seluruh kasus yang ditangani oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak telah mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan minimal (SPM). Hal ini mengindikasikan tingkat responsivitas dan efektivitas pelayanan yang optimal.

Untuk indikator Persentase Peserta KB Aktif Realisasi tercapai sebesar 65,31% dari target 70,40%, dengan tingkat capaian kinerja 92,85%. Adapun jumlah akseptor KB Aktif sebanyak 135.548 per Bulan November yang ditarik data dari Aplikasi SIGA BKKBN Provinsi Jawa Timur, untuk bulan Desember data Akseptor KB Aktif belum terupdate. Meskipun secara kuantitas jumlah akseptor mencapai 135.548 dari 207.524 PUS, terdapat selisih yang disebabkan oleh dinamika mobilitas penduduk dan perubahan metode kontrasepsi. Namun, capaian di atas 90% menunjukkan kategori kinerja yang "Sangat Tinggi". Capaian ini tidak terlepas dari pelaksanaan program Keluarga Berencana melalui kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta pembinaan di fasilitas kesehatan dan Kampung KB yang berjalan efektif. **Analisis Kesenjangan Indikator KB Aktif** Terdapat *gap* sebesar **5,09%** dari target. Analisis menunjukkan adanya tren "Penundaan Kehamilan Pertama" pada pasangan muda dan adanya kendala aksesibilitas di wilayah pinggiran yang berdampak pada angka *drop-out* penggunaan kontrasepsi jangka pendek.

Sementara itu, indikator Persentase Unmet Need Indikator ini menunjukkan keberhasilan yang signifikan dengan capaian sebesar 178,3%. Realisasi angka Unmet Need berhasil ditekan hingga ke angka 6% (11.767 PUS), jauh lebih baik daripada target maksimal yang ditetapkan sebesar 10,70%. Hal ini merepresentasikan efektivitas program penyuluhan dan distribusi alat kontrasepsi yang tepat sasaran, jika dibandingkan tahun 2024 dengan capaian 6.69%. Rendahnya unmet need

menggambarkan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan KB dan efektivitas advokasi terhadap pasangan usia subur.

Capaian indikator **Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)** Realisasi anggaran yang memiliki fokus pada kesetaraan gender mencapai **70%** (473 sub-kegiatan dari 673 sub-kegiatan non-rutin). Jika dibandingkan dengan target awal sebesar **39,00%**, maka capaian kinerja indikator ini adalah **55,71%**. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya kegiatan pengarusutamaan gender melalui peningkatan kapasitas OPD dan desa dalam pelaksanaan PUG serta PPRG, yang berdampak pada meningkatnya integrasi isu gender dalam kebijakan pembangunan daerah.

Capaian Layanan Komprehensif Perempuan Korban Kekerasan & TPPO Tercapai realisasi 100%, di mana seluruh 94 laporan kasus yang masuk telah mendapatkan layanan komprehensif. Perlu dicatat bahwa perbandingan dengan data Provinsi Jawa Timur dan Kementerian PPPA belum dapat dilakukan karena data tersebut belum dirilis.

Sementara itu, Capaian Layanan Komprehensif Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Tercapai realisasi 100%, dengan total 116 kasus yang seluruhnya telah tertangani melalui layanan komprehensif. Sama halnya dengan indikator perempuan, data perbandingan tingkat regional dan nasional masih menunggu rilis resmi dari instansi terkait.

Selanjutnya, indikator **Nilai Evaluasi SAKIP** Realisasi nilai SAKIP mencapai **71,25** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Jika dibandingkan dengan target predikat A (80), maka capaian kinerja adalah **89%**. Predikat BB menunjukkan bahwa Dinas PPKB PPPA telah mengimplementasikan manajemen kinerja yang akuntabel, meskipun diperlukan penguatan lebih lanjut pada aspek efisiensi anggaran untuk menuju predikat A. Hal ini menunjukkan bahwa instansi telah menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi secara lebih baik.

Dari sisi perbandingan kinerja, jika dilihat terhadap capaian tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional, beberapa indikator strategis DPPKBPPPA Kabupaten Jombang menunjukkan hasil sebagai berikut :

- a) Unmet Need: Terdapat selisih (gap) sebesar 0,63% antara realisasi Kabupaten Jombang (6,00%) dengan capaian Provinsi Jawa Timur (5,37%). Meskipun angka Unmet Need Jombang sudah masuk kategori

rendah, namun capaian Provinsi menunjukkan standar yang lebih kompetitif. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas untuk lebih memperkuat edukasi kepada Pasangan Usia Subur (PUS) agar angka Unmet Need dapat ditekan hingga di bawah angka rata-rata Provinsi.

- b) Peserta KB Aktif: Perbandingan belum dapat dilakukan secara objektif dikarenakan data resmi tingkat Provinsi dan Nasional belum dirilis pada saat laporan ini disusun.

Jika dilihat dari sektor perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang menunjukkan hasil yang memuaskan diantaranya lain:

- a) Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang mencatatkan kinerja sempurna (100%) dalam pemberian layanan komprehensif baik bagi perempuan korban kekerasan/TPPO maupun Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Ketiadaan data pembanding dari Kementerian PPPA dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyebabkan posisi relatif (benchmarking) Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang terhadap capaian wilayah lain belum dapat dipetakan sampai laporan ini disusun. Namun, secara mandiri, target daerah telah terpenuhi secara tuntas.

Indikator Anggaran Responsif Gender (ARG): Realisasi sebesar 70,00% merupakan pencapaian internal yang signifikan. Analisis perbandingan masih menunggu rilis data nasional sebagai standar acuan ketersediaan anggaran berbasis gender di tingkat kementerian/lembaga.

Sementara SAKIP: Predikat BB memosisikan Dinas PPKB PPPA sebagai instansi dengan tata kelola kinerja "Sangat Baik". Fokus utama tetap pada peningkatan kualitas internal menuju predikat A, selaras dengan semangat reformasi birokrasi nasional.

Keterbatasan analisis dalam bab ini disebabkan oleh perbedaan siklus rilis data antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat (Kementerian PPPA dan BKKBN). Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang akan melakukan analisis *update* melalui laporan berkala segera setelah data agregat Provinsi Jawa Timur dan Nasional dipublikasikan secara resmi untuk memastikan strategi tahun 2026 tetap relevan dengan tren nasional.

Jika dikaitkan dengan realisasi anggaran, tingkat penyerapan mencapai rata-rata di 69%, dengan efisiensi penggunaan sumber daya berkisar antara 2–14% tergantung program. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas output. Sementara ada program penyerapan tertinggi pada Program Perlindungan Perempuan dengan penyerapan anggaran 93.73%, tingginya penyerapan ini linier dengan realisasi layanan yang mencapai **100%** dan seluruh target kinerja tercapai 100%, menandakan keseimbangan antara capaian output dan efektivitas anggaran.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja DPPKBPPPA Kabupaten Jombang Tahun 2025 tergolong sangat baik, dengan sebagian besar indikator mencapai target bahkan melampaui, serta menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah peningkatan indeks pemberdayaan gender dan pemantapan strategi dalam menekan angka unmet need. Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi sumber daya manusia, dan penerapan prinsip good governance, diharapkan kinerja Dinas akan terus meningkat pada periode mendatang.

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase rata-rata capaian kinerja aparatus	100%			4.269.868.886	2.758.766.225	64,61%
2.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai aturan	100%			4.269.868.886	2.866.371.882	67.13%
2.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan			4.066.123.136	2.716.576.882	66.81%
2.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	4 Dokumen			199.710.000	147.375.000	73,79%

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keuangan SKPD						
2.01.01.2.02.0007	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18 Laporan			4.035.750	2.420.000	59,96%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	77.22%			312.901.500	164.328.176	52.52%
2.08.02.2.01	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah yang melaksanakan kelembagaan PUG	31%			105.700.250	103.916.500	98.31%
2.08.02.2.01.0001	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Dokumen			105.700.250	103.916.500	98.31%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG							
2.08.02.2.02	Persentase lembaga perempuan yang melaksanakan pemberdayaan perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%			134.179.000	24.218.950	18.05%
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							

2.08.02.2.02.0001	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	23 Dokumen			134.179.000	24.218.950	18.05%
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%			73.022.250	36.192.726	49.56%
2.08.02.2.03.0002	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	415 Orang			73.022.250	36.192.726	49.56%
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase kasus tindak kekerasan pada perempuan yang terselesaikan	100%			250.686.950	238.880.784	95.29%
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%			57.389.450	55.988.784	97,56%

2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen			39.135.000	39.135.000	100%
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Perangkat Daerah			18.252.450	16.853.780	92,33%
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus tindak kekerasan pada perempuan yang dilayani sesuai SPM	100%			147.350.000	136.944.500	92.94%
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	42 Orang			42.105.000	42.102.000	99.99%

2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan			105.245.00	94.842.500	90.12%
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mampu menyediakan layanan perlindungan perempuan	100%			45.947.500	45.947.500	100%
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang			45.947.500	45.947.500	100%
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa Layak Anak		100%			136.008.00	80.779.600	59,39%
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa dengan Kelembagaan Layak Anak	100%			108.404.00	53.860.600	49,69%

2.08.06.2.01.0001	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Organisasi			29.747.500	0,00	0,00%
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			78.656.500	53.860.600	68,48%
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%			27.604.000	26.919.000	97,52%
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen			27.604.000	26.919.000	97,52%

2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus tindak kekerasan pada anak yang terselesaikan	100%			337.176.00	253.210.00	75.1%
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang aktif melaksanakan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%			67.839.00	31.210.00	46,01%
2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan /Program/Kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	72 Orang			67.839.00	31.210.00	46,01%
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyedia Layanan Kasus tindak kekerasan pada anak	100%			166.194.00	119.347.00	71.81%
2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	40 Orang			38.074.00	33.743.00	88,62%

2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	6 Layanan			128.120.00	85.604.00	66.82%
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan anak yang aktif	100%			103.143.00	102.653.00	99.52%
2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	20 Kegiatan			34.123.00	34.123.00	100%
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	73 Orang			69.020.00	68.530.00	99.29%
2.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%						
2.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%			75.576.083	6.896.000	9.12%
2.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 Dokumen			70.376.082	1.696.000	2.41%

Daerah							
2.01.01.2.01.0006	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan			5.200.001	5.200.000	100%
2.01.01.2.06	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100%			217.342.899	127.404.825	58.62%
2.01.01.2.06.0001	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	4 Paket			2.264.950	2.167.500	95,70%
2.01.01.2.06.0002	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			47.792.449	32.243.832	67,47%
2.01.01.2.06.0004	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			84.700.000	47.780.000	56.41%
2.01.01.2.06.0005	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			9.835.600	5.562.200	56,55%
2.01.01.2.06.0006	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	12 Dokumen			4.704.900	2.700.000	57.4%

	Disediakan						
2.01.01.2.06.0009	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			68.045.900	36.951.293	54,3%
2.01.01.2.08	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	100%			342.346.000	247.083.268	72,17%
2.01.01.2.08.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			2.200.000	1.500.000	68,18%
2.01.01.2.08.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			112.740.000	80.407.115	71,32%
2.01.01.2.08.04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			227.406.000	165.176.153	72,63%
2.01.01.2.09	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	100%			241.031.637	180.181.951.083	75,49%
2.01.01.2.09.0002	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				140.560.000	97.311.083	69,23%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						

2.01.01.2.09.0009	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			37.621.637	37.600.000	99,94%
2.01.01.2.09.0010	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	93 Unit			62.850.000	47.040.000	74,84%
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Presentase data kecamatan yang terupdate tepat waktu	94%			506.324.600	318.154.652	63,90%
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi keluarga terupdate	99%			506.324.600	318.154.652	63,90%

2.14.02.2.02.0011	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	21 Dokumen			31.124.600	26.644.000	85,6%
2.14.02.2.02.0012	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	21 Laporan			273.600.000	151.800.000	55,48%
2.14.02.2.02.0013	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	21 laporan			201.600.000	139.710.652	69,30%
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Akseptor KB Aktif	2,5%			5.738.074.800	4.718.237.639	82,23%

2.14.03.2.01	Cakupan Pasangan usia subur yang mendapatkan KIE	100%			1.132.272.500	871.741.691	76.99%
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal							
2.14.03.2.01.0010	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	21 Laporan			755.959.850	581.777.991	76.96%
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana							
2.14.03.2.01.0011	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	21 Laporan			155.925.000	120.252.000	77,12%
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)							
2.14.03.2.01.0012	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media	5 Dokumen			97.010.000	66.000.000	68,03%
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang							

	Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						
2.14.03.2.01.0013	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Dokumen			12.312.500	11.338.000	92,09%
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders oleh Mitra Kerja	1 Organisasi			111.065.150	92.373.700	83,17%
2.14.03.2.02	Persentase Kader IMP yang Aktif	100%			2.615.425.000	2.005.058.948	76,66%
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	46 Orang			1.995.440.000	1.395.605.000	69,94%
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi			0,0	0,0	0,00%

	di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB						
2.14.03.2.02.0006	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan, Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga berencana (PKB/PLKB)	4 Laporan			619.985.000	609.453.948	98,30%
2.14.03.2.03	Persentase Pelayanan KB dan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang terpenuhi	70,40%			1.462.702.300	1.395.712.000	95,42%
2.14.03.2.03.0001	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan			44.250.000	30.875.000	69,77%
2.14.03.2.03.0003	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3023 Orang			1.357.404.300	1.303.626.000	96,04%

2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Perkawinan Pertama Usia <20 tahun	9.54%			7.168.398.800	5.292.249.400	73.83%
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pertumbuhan jumlah keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang dibina	100%			359.712.800	224.667.300	62.46%

2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	4 laporan			76.112.800	71.517.300	93.96%
2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan			153.600.000	153.150.000	100%
2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang	30 Unit			130.000.000	0,0	0,0

	tersedia						
2.14.04.2.02	Persentase Organisasi yang dibina (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%			6.808.686.000	5.067.582.100	74.43%
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
2.14.04.2.02.0003	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	101 Organisasi			109.686.000	73.782.100	67.27%
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							
2.14.04.2.02.0005	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	21 Laporan			3.045.000.000	2.436.000.000	80%
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)							
2.14.04.2.02.0006	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon	21 Laporan			3.654.000.000	2.557.800.000	80%
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Tergantung							

remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan						
TOTAL					19.834.556.105	14.208.655.309	72%

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang harus didukung dengan dana yang memadai, baik jumlahnya maupun kelancaran pencairannya. Pagu anggaran program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang tahun 2025 adalah sebesar Rp. 19.834.556.105, (Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Lima Rupiah). Dengan pendanaan tersebut terealisasi sebesar Rp. 14.208.655.309, (Empat Belas Miliar Dua Ratus Delapan Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah).

Selain itu, pelaksanaan program DPPKBPPPA juga menghadapi beberapa kendala, antara lain keterlambatan petunjuk teknis dari pemerintah pusat/provinsi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan PPKB dan PPPA, keterbatasan sarana prasarana pendukung, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, tingginya dinamika kasus perlindungan perempuan dan anak yang membutuhkan penanganan intensif, serta keterbatasan jumlah penyuluh KB dibandingkan desa/kelurahan binaan.

LOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Persentase Peserta KB Aktif	6.244.399.400	5.036.392.291	81,09%
2	Menurunnya Unmet Need	Persentase Unmet Need	7.168.398.800	5.292.249.400	73.83%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	312.901.500	164.328.176	52.52%

4	Meningkatnya Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	250.686.950	238.880.784	95.29%
5	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perlindungan Khusus Anak Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	473.184.000	333.989.600	70.60%
6	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	5.384.985.455	3.589.965.058	67%

Keterangan:

Pada tahun anggaran 2025, Dinas PPKB PPPA mengelola anggaran untuk mendukung 6 (enam) Sasaran Strategis. Secara umum, penggunaan anggaran telah dilakukan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi, di mana sebagian besar target kinerja tercapai meskipun penyerapan anggaran belum mencapai 100%.

Penjelasan Capaian Anggaran Per Sasaran :

1. **Meningkatnya Peserta KB Aktif:** Mencapai realisasi sebesar **81,09%** (Rp5.036.392.291). Penyerapan yang cukup tinggi ini menunjukkan keberhasilan program penyuluhan dan ketersediaan alat kontrasepsi bagi masyarakat Jombang berjalan secara konsisten.menghasilkan capaian kinerja 92,85%.
2. **Menurunnya Unmet Need:** Terealisasi sebesar **73,83%** (Rp5.292.249.400). Anggaran ini dialokasikan untuk menjangkau pasangan usia subur yang belum terlayani. Tergolong sangat efisien karena mampu melampaui target kinerja hingga 178,3% (berhasil menekan angka Unmet Need hingga 6%). Hal ini menunjukkan optimalisasi biaya penyuluhan yang sangat tinggi.
3. **Layanan Korban Kekerasan dan TPPO:** Menunjukkan kinerja anggaran **tertinggi** sebesar **95,29%** (Rp238.880.784). Hal ini merefleksikan respons cepat dinas dalam memberikan layanan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan di Kabupaten Jombang, yang bersifat krusial dan mendesak. Hal ini mencerminkan komitmen (pelayanan langsung kepada korban) dengan hasil capaian kinerja 100%.

4. **Perlindungan Khusus Anak:** Mencapai **70,60%** (Rp333.989.600). Penyerapan ini mendukung berbagai layanan pendampingan anak, meskipun masih terdapat ruang untuk optimalisasi program preventif di lingkungan sekolah dan masyarakat
5. **Pemberdayaan Perempuan (IDG):** Realisasi anggaran sebesar **52,52%** (Rp164.328.176). Rendahnya serapan ini disebabkan oleh adanya perubahan jadwal koordinasi lintas sektor. Namun, Dinas PPKB PPPA tetap berupaya agar Indeks Pemberdayaan Gender tetap terjaga melalui pengarusutamaan gender yang efektif.
6. **Kualitas Akuntabilitas Kinerja (SAKIP):** Realisasi anggaran sebesar **67%** (Rp3.589.965.058). Fokus penggunaan anggaran diarahkan pada penguatan sistem pelaporan, evaluasi internal, dan perbaikan tata kelola birokrasi guna mencapai predikat SAKIP yang lebih baik. Hasil predikat **BB** menunjukkan bahwa dengan serapan anggaran yang baik, Dinas PPKB PPPA mampu menyelenggarakan sistem akuntabilitas yang sangat baik.

Secara keseluruhan, rata-rata penyerapan anggaran Dinas PPKB PPPA Tahun 2025 adalah sebesar 69,60% per Bulan Agustus 2025. Meskipun penyerapan belum mencapai angka maksimal, namun secara substansi seluruh target sasaran kinerja berhasil dipenuhi (dan beberapa melampaui target). Hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah menerapkan prinsip Value for Money, yaitu mencapai hasil maksimal dengan penggunaan anggaran yang hemat dan efisien.

3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja		Capaian Kinerja %	SDM			Tk. Efisiensi
			Target	Realisasi		Kebutuhan	Kondisi Saat ini	Cakupan	
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Presentase data kecamatan yang terupdate tepat waktu	83%	78%	93%	5	1	20,00	73,00
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Akseptor KB Aktif	0,5%	0.5%	100%	7	3	42,86	57,14
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Perkawinan Pertama Usia <20 tahun	55%	55%	100%	7	2	28,57	71,43

4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa Layak Anak	100%	100%	100%	5	2	40,00	51,00
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus tindak kekerasan pada anak yang terselesaikan	100%	100%	100%	7	2	28,57	71,43
6	PROGRAM PENGARUSTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	75,56%	69%	91%	5	2	40,00	51,00
7	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus tindak kekerasan pada perempuan yang terselesaikan	100%	100%	100%	7	2	28,57	71,43
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	15	7	46,67	53,33

Dilihat dari efisiensi penggunaan anggaran, maka dapat diketahui bahwa:

1. **Unmet Need:** Mencatatkan efisiensi sebesar 73.00 yang sangat efisien. Dengan penyerapan anggaran sebesar 73.83%. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi penyuluhan dan penggerakan lapangan dilakukan secara sangat produktif dengan biaya yang minimal.
2. **Peserta KB Aktif:** Mencapai tingkat efisiensi positif sebesar 57.14%, di mana sasaran kinerja tetap terjaga tinggi meskipun penggunaan anggaran berada di angka 81,09% dengan capaian kinerja sebesar 100%
3. **Perlindungan Perempuan:** Anggaran terserap secara proporsional sebesar **95.52%** untuk menjamin layanan **100% tuntas**. Efisiensi sebesar **71.43%** menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran didedikasikan langsung untuk penanganan kasus yang bersifat mendesak.
4. **Perlindungan Khusus Anak:** Terjadi efisiensi sebesar **71.43%**. Capaian layanan 100% tetap terpenuhi meskipun hanya menyerap 56% anggaran. Hal ini dikontribusikan

oleh optimalisasi jejaring kerja antar lembaga perlindungan anak yang bersifat lintas sektor.

5. **IDG (Pemberdayaan Perempuan):** Meskipun terdapat kendala administratif yang menyebabkan penyerapan hanya **40,78%**, namun melalui optimalisasi fungsi advokasi dan koordinasi, capaian kinerja tetap mampu menyentuh angka **91%**. Terjadi efisiensi sebesar **51.00%**

6. **SAKIP:** Dengan efisiensi anggaran sebesar **53.33%**, Dinas PPKB PPPA tetap mampu mempertahankan kualitas manajemen kinerja pada predikat **BB**.

Secara keseluruhan, Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang telah menerapkan prinsip **Value for Money**, di mana seluruh sasaran strategis mencatatkan nilai efisiensi yang positif (Capaian Kinerja > Penyerapan Anggaran). Hal ini mengindikasikan bahwa instansi berhasil melakukan penghematan pada belanja pendukung tanpa mengurangi kualitas output layanan kepada masyarakat.

Dilihat dari Sumber Daya Manusia berdasarkan perhitungan beban kinerja Analisis Jabatan, Dinas PPKBPPPA telah melaksanakan kinerja dengan prinsip efisiensi rata-rata di atas 50% dengan rincian:

1. Program Pengendalian Penduduk secara ideal memerlukan 5 orang, namun saat ini hanya terdapat 1 orang pelaksana program tersebut sehingga tingkat efisiensi berhasil mencapai 73.00% dengan cakupan 92%.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) secara ideal memerlukan 7 orang, namun saat ini hanya terdapat 3 orang pelaksana program tersebut sehingga tingkat efisiensi berhasil mencapai 57,14% dengan cakupan 2,5%.
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) secara ideal memerlukan 7 orang, namun saat ini hanya terdapat 2 orang pelaksana program tersebut sehingga tingkat efisiensi berhasil mencapai 71,43% dengan cakupan 100%.
4. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Secara ideal memerlukan 5 orang, namun saat ini hanya terdapat 2 orang pelaksana program tersebut sehingga tingkat efisiensi berhasil mencapai 51.00% dengan cakupan 73,33%
5. Program Perlindungan Perempuan secara ideal memerlukan 7 orang, namun saat ini hanya terdapat 2 orang pelaksana program tersebut sehingga tingkat efisiensi

- berhasil mencapai 71,43% dengan cakupan 100%.
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Secara ideal memerlukan 5 orang, namun saat ini hanya terdapat 2 orang pelaksana program tersebut sehingga tingkat efisiensi berhasil mencapai 60% dengan cakupan 100%.
 7. Program Perlindungan Khusus Anak secara ideal memerlukan 7 orang, namun saat ini hanya terdapat 2 orang pelaksana program tersebut sehingga tingkat efisiensi berhasil mencapai 71,43% dengan cakupan 100%.
 8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota secara ideal memerlukan 15 orang, namun saat ini hanya terdapat 7 orang pelaksana program tersebut sehingga tingkat efisiensi berhasil mencapai 53,33% dengan cakupan 100%.

Meskipun efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada tahun 2025 dinilai Sangat Efisien, terdapat kesenjangan (gap) yang lebar antara kondisi riil dan kebutuhan ideal. Untuk menjaga keberlanjutan kinerja pada tahun 2026, direkomendasikan adanya penambahan personel secara bertahap atau peningkatan kapasitas (up-skilling) personel yang ada agar kualitas layanan tetap terjaga meskipun dalam kondisi keterbatasan jumlah SDM.

3.3. Upaya Perbaikan Kinerja

Tantangan dalam kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Jombang dapat dihadapi dengan beberapa solusi yang mungkin relevan:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Tantangan pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Solusi yang dapat diambil adalah melalui kampanye penyuluhan, pendidikan, dan sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara aktif. Menggunakan berbagai media komunikasi seperti ceramah, diskusi kelompok, media sosial, dan program radio atau televisi dapat membantu menyebarkan informasi yang relevan.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan anggaran, personel, dan infrastruktur dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan program dengan efektif. DPPKBPPPA dapat mencari pendanaan tambahan melalui kerjasama dengan pihak swasta, organisasi

non- pemerintah, atau lembaga internasional. Selain itu, upaya pengoptimalan penggunaan sumber daya yang ada, termasuk pelatihan dan peningkatan kapasitas staf, juga dapat membantu mengatasi keterbatasan tersebut.

3. Kurangnya Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor

Tantangan dalam membangun sinergi dengan lembaga dan instansi terkait dapat diatasi dengan memperkuat kerjasama lintas sektor. DPPKBPPPA dapat menjalin kemitraan dan membangun jaringan kerja dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, pihak kesehatan, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak. Kolaborasi ini akan memperkuat implementasi program dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efektif.

4. Pengukuran dan Pemantauan Kinerja

Untuk memastikan keberhasilan program, penting untuk memiliki sistem pengukuran dan pemantauan yang baik. DPPKBPPPA dapat mengembangkan sistem pelaporan dan evaluasi yang terstandarisasi untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan melakukan pemantauan secara berkala, dapat diidentifikasi kelemahan dan kesempatan untuk perbaikan dan peningkatan program.

5. Partisipasi Aktif Masyarakat

DPPKBPPPA dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok ibu-ibu, kelompok pemuda, atau lembaga desa yang berperan dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, akan tercipta pemahaman yang lebih baik dan keberlanjutan yang lebih tinggi.

Mengatasi tantangan tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari DPPKBPPPA serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat itu sendiri. Dengan upaya yang berkelanjutan, diharapkan kinerja DPPKBPPPA Kabupaten Jombang dapat meningkat dan memberikan dampak positif yang signifikan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum, capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 dapat dikategorikan baik. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, namun secara keseluruhan program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari terselenggaranya seluruh kegiatan serta tercapainya sebagian besar target indikator kinerja yang telah direncanakan.

Dalam perjalanan pelaksanaan program, apabila terjadi perubahan kebijakan ataupun dinamika lingkungan strategis, maka penyesuaian tetap perlu dilakukan. Penyesuaian tersebut harus senantiasa memperhatikan visi, misi, serta tugas pokok dan fungsi Dinas PPKBPPA Kabupaten Jombang sehingga setiap langkah yang diambil tetap sejalan dengan arah pembangunan daerah.

Untuk mencapai indikator kinerja utama tahun anggaran 2025, diperlukan upaya yang lebih optimal dan terarah. Berbagai strategi penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan, serta sinergi dengan pemangku kepentingan perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan program dapat mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jombang.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB3A) Kabupaten Jombang Tahun 2025, terdapat beberapa faktor penghambat yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Untuk memastikan capaian kinerja pada tahun berikutnya terus meningkat, rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Upaya Mempertahankan Capaian Pengendalian Penduduk dan Penurunan Angka Kelahiran, beberapa kendala yang muncul perlu segera ditindaklanjuti melalui:
 - Optimalisasi anggaran layanan KB terutama bagi calon akseptor MKJP (MOW/MOP) non-BPJS miskin melalui APBD.

- Peningkatan layanan mobil akseptor KB, khususnya untuk menjangkau wilayah terpencil.
 - Pelaksanaan bakti sosial KB bekerja sama dengan TNI, Dinas Kesehatan, PKK, dan stakeholder lainnya secara berkala minimal satu kali dalam setahun.
 - Penguatan program pelayanan masyarakat, termasuk keberlanjutan program inovatif seperti Bulaga (Bupati Melayani Warga), dengan penjadwalan yang lebih efektif.
- b. Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, Untuk meningkatkan capaian indikator pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, beberapa langkah yang perlu dilaksanakan antara lain:
- Keberlanjutan pelatihan/ bimtek PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) secara rutin setiap tahun.
 - Penguatan desk penyusunan dokumen PPRG di tingkat OPD.
 - Peningkatan koordinasi lintas instansi dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
 - Peningkatan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk memperkuat edukasi dan diseminasi isu pemberdayaan perempuan.
 - Penyusunan Peraturan Bupati terkait Forum PUSPA di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan untuk memperluas partisipasi masyarakat.
 - Peningkatan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum.
 - Penyusunan regulasi pembentukan Forum Anak Daerah (FAD), Sekolah Ramah Anak (SRA), dan Kabupaten Layak Anak secara berkelanjutan.
- c. Upaya Meningkatkan Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Beberapa hambatan yang ditemui perlu ditangani melalui:
- Peningkatan koordinasi dengan Tim UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan.
 - Optimalisasi armada layanan Molin dan Torlin untuk memperluas jangkauan pelayanan kasus kekerasan.
 - Memaksimalkan layanan berbasis digital, termasuk website, media sosial, dan kanal pelaporan yang mudah diakses masyarakat.

- Peningkatan kapasitas aparatur dalam penanganan kasus kekerasan berbasis SOP yang terstandar.
- d. Upaya Memperkuat Kelembagaan dan Tata Kelola Internal, Untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi, diperlukan:
- Penguatan koordinasi dengan OPD terkait dalam penyelarasan program lintas sektor.
 - Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, termasuk validasi dan integrasi data lintas bidang.
 - Penyusunan regulasi dan pedoman internal guna mendukung akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
 - Peningkatan partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi publik dan pelibatan komunitas dalam pembangunan.

Manfaat yang diharapkan Dengan dilaksanakannya rencana tindak lanjut tersebut, diharapkan:

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi.
- b. Menjadi umpan balik yang efektif untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya.
- c. Memberikan gambaran objektif atas keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- d. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- e. Menjadikan Dinas PPKBPPA sebagai instansi yang responsif, efektif, efisien, serta adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

Jombang, Januari 2026

KEPALA DINAS PPKBPPA



Dr. dr. Ma'murotus Sa'diyah, M. Kes

NIP. 197112142005012006